

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Demokrasi.....	19
1. Tinjauan Umum Demokrasi	19
2. Demokrasi deliberatif	21
B. Teori Partisipasi Masyarakat	25



1. Hakikat dan pengertian partisipasi masyarakat	25
2. Model Partisipasi Masyarakat	29
3. Derajat Partisipasi Masyarakat	31
C. <i>Meaningful Participation</i>.....	32
1. Hakikat <i>Meaningful Participation</i>	32
2. <i>Meaningful Participation</i> sebagai prinsip dasar legislasi	34
3. <i>Meaningful Participation</i> dalam legislasi	37
D. Teori Pembentukan Undang-Undang.....	39
1. Proses Pembentukan Undang-Undang	40
2. Asas-Asas dalam Pembentukan Undang-Undang	42
BAB III METODE PENEILITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	44
B. Bahan dan Data Penelitian	45
1. Bahan Hukum Primer	45
2. Bahan Hukum Sekunder.....	47
3. Bahan Hukum Tersier	47
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Belum Mengakomodir Konsep <i>Meaningful Participation</i> Secara Sungguh-Sungguh	49
1. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang	49
2. Permasalahan Pengaturan Partisipasi Masyarakat yang Mengakomodir Konsep <i>Meaningful Participation</i> dalam Proses Pembentukan Undang-Undang	68



B. Rekonstruksi Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang	83
1. Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang- Undang	83
2. Rekontruksi Norma Hukum yang mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang	92
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Ketentuan Partisipasi Masyarakat dalam UU P3 & Perubahan Kedua UU P3.....	6
Tabel 2 Jenjang Tingkat Partisipasi Masyarakat	31
Table 3 Rekonstruksi Norma Hukum Partisipasi Masyarakat yang Berbasiskan Konsep <i>Meaningful Participation</i>	92